DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

American Institute of Banking The American Bankers Association diterjemahkan oleh Hasymi Ali, (1995) *Manajemen Bank,* Bumi Aksara, Jakarta.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, (2010) *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, (2013) *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Irma Devita Purnamasari, (2014) *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung.

Kasmir, (2011) *Manajemen Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ktut Silvanita, (2009) *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta.

Malayu S.P. Hasibuan, (2011) *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muchdarsyah Sinungan, (1997) *Manajemen Dana Bank* Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhamad Djumhana, (2000) *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, (2005) *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Otje Salman S dan Andi F. Susanto, (2013) *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung.

R. Setiawan, , (2005) *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung,

Riduan Syahrani, (2006) *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Rudyanti Dorotea Tobing, (2014) *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi,* Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Sentosa Sembiring, (2012) *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.

Siswanto Sutojo, (2008) *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Dan Kasus Handling The Problem Loan*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

Soediman Kartohadiprodjo, (1976) *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Subekti, (1983) *Hukum Perjanjian* Cetakan ke VII, Intermasa, Jakarta.

Sunaryati Hartono, (1998) *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Sutarno, (2003) *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Zainal Asikin, (1995) *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zulfi Diane Zaini, (2012) *Independensi Bank Indonesia dan* Penyelesaian Bank Bermasalah, Keni Media, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI Tahun 2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI Tahun 2009 Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tahun 2012 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03 Tahun 2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03 Tahun 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jas Keuangan Nomor 5/POJK.03 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jas Keuangan Nomor 6/POJK.03 Tahun 2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 16/SEOJK.03 Tahun 2015 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

C. Internet

http://www.bi.go.id

http://www.ojk.go.id

http://www.indonesia-investments.com

http://www.kompasiana.com

http://kafeilmu.com

http://brainly.co.id

http://www.hukumonline.com

http://www.bi.go.id

https://bh4kt1.wordpress.com

http://bankernote.com

D. Media Cetak

Harian Umum Kompas, terbit tanggal tanggal 11 Maret 2015.

Harian Umum Kompas, terbit tanggal 12 Maret 2015.